

Tiga Aliran Ekstrem yang Mengarah ke Aksi Terorisme Versi Mahfud MD

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkumham), Mahfud MD mengungkap tiga jenis ekstremisme yang mengarah pada tindakan terorisme, intoleransi dan pemecah belah persatuan.

"Tiga jenis ekstremisme yang dapat mengarah pada tindakan terorisme dan intoleransi, serta berpotensi memecah-belah persatuan bangsa yaitu jihadis, takfiri dan ekstremisme ideologis," kata Mahfud dalam unggahan instagram @mohmahfudmd yang dilihat pada Minggu (6/2).

Pertama yaitu ekstremisme jihadis, aliran yang paling ekstrem karena melakukan pembunuhan kepada orang lain sebab adanya perbedaan paham. Mahfud tegaskan kelompok ekstremisme ini juga tidak segan membunuh orang atau kelompok tertentu yang dianggap menghalangi tujuan paham mereka.

"Ekstremisme ini contohnya adalah ISIS dan beberapa kelompok terorisme di Indonesia. Mereka tidak hanya menyerang kelompok yang dianggap sebagai lawan, tetapi juga pihak yang dipandang menghalangi tujuan

mereka," beber Mahfud. Selanjutnya adalah paham ekstremisme takfiri, Mahfud menilai kelompok ini memusuhi orang lain yang berbeda dari segala bentuk seperti pemikiran bahkan simbol-simbol tertentu.

"Takfiri adalah paham yang menganggap paham lain, walaupun satu agama, adalah paham yang sesat, kafir, yang tidak saja harus di jauhi tetapi harus dimusuhi," ungkap mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur tersebut.

Dan yang terakhir, paham ekstremisme ideologis, menurut Mahfud, paham yang lunak tetapi masih berbahaya. Mahfud menjelaskan kelompok ini meyakini paham dirinyalah yang paling benar sehingga menganggap paham selainnya adalah salah.

Selain itu, Mahfud mencontohkan kasus ekstremisme ideologis ini yaitu mereka menolak paham nasionalisme seperti Pancasila yang juga dianggap sesat. "Mereka berupaya mengubah Pancasila dengan mempengaruhi pemikiran melalui lembaga pendidikan dan diskusi, serta brosur-brosur penyusupan bahwa Pancasila salah dan harus diganti," tutup Mahfud. **han**

2 Polhukam

FOTO: ANT



GUBERNUR JAWA TIMUR MENINJAU RUANG ISOLASI DI SIDOARJO

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) meninjau tempat isolasi pasien COVID-19 di Gedung Mal Pelayanan Publik Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (6/2). Pembak Sidoarjo menyiapkan ruang isolasi berkapasitas 124 bilik untuk pasien bergejala ringan dan OTG sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 varian Omicron yang diprediksi gelombang puncaknya terjadi pada Maret 2022.

Siapa Capres dari PDI-P di 2024, Puan Maharani atau Ganjar Pranowo?

Hasil survei beberapa lembaga survei terkait elektabilitas Capres untuk 2024, nama Ganjar Pranowo selalu jauh berada di atas nama Puan Maharani. Jadi siapa yang akan diusung PDIP?

JAKARTA (IM) - Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Ketua DPR, Puan Maharani, kerap muncul dalam simulasi calon presiden 2024 di berbagai survei. Bagaimana posisi elektabilitas keduanya berdasarkan survei?

Berdasarkan hasil survei Lembaga Trust Indonesia yang dirilis pada Senin (31/1) lalu, elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di

posisi teratas. Sementara itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalahkan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Survei tersebut dilakukan pada 3-12 Januari 2022 melalui wawancara tatap muka. Total sampel sebanyak 1.200 responden, margin of error 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan

metode multistage sampling. Quality control survei ini 20 persen dari total jumlah sampel secara random dengan cara mendatangi kembali responden terpilih mengkonfirmasi ulang responden terpilih (hot spot checking).

Dari survei itu, ada 26 tokoh yang muncul. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo muncul di urutan ketiga dengan perolehan suara sebanyak 16,1 persen. Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani berada di urutan ketujuh dengan jumlah suara sebesar 2,8 persen.

Sedangkan dalam survei Indikator Politik Indonesia (IPI) Ganjar Pranowo menjadi sosok capres dengan suara tertinggi kedua, setelah nama Prabowo Subianto di posisi

puncak.

Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 6-11 Desember 2021. Populasi survei tersebut adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

Penarikan sampel survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Total sampel 2020 responden, dengan sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi, serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.

Margin of error survei tersebut +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara lewat tatap muka.

Dalam surveinya, responden disodorkan 33 nama tokoh yang dianggap berpotensi menjadi capres. Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di urutan kedua dengan jumlah suara sebanyak 20,8 persen, sedangkan Ketua DPR RI Puan Maharani justru jauh dibawahnya, yaitu berada di urutan kesembilan dengan jumlah suara sebanyak hanya 1,8 persen.

Kemudian lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terbarunya terkait kecenderungan perilaku politik pemilih nasional, Selasa (28/12) lalu. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru unggul jika pemilihan presiden (pilpres) dilakukan pada saat survei.

Survei SMRC tersebut dilakukan pada 8-16 Desember 2021, yang melibatkan 2.420 responden, dengan tingkat respons sebanyak 2.062 responden atau 85 persen dari sampel direncanakan. Populasi dipilih secara acak dengan multistage random sampling dengan error sampling +/- 2,2 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei tersebut menampilkan deretan sosok yang akan dipilih menjadi presiden apabila pilpres diadakan saat itu dengan pertanyaan tertutup. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas sebesar 22,5 persen. Jauh di bawahnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh suara sebanyak 2,3 persen. **han**



PERKETAT PENGAWASAN SYARAT PELAKU PERJALANAN

Sejumlah calon penumpang memverifikasi syarat administrasi pelaku perjalanannya di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (6/2). Pemerintah setempat memperketat pengawasan syarat administrasi pelaku perjalanan baik udara, darat, maupun laut seperti sertifikat vaksin dan keterangan bebas COVID-19 menyusul melonjaknya kasus positif COVID-19 di daerah tersebut dalam kurun sepekan terakhir.

Romahurmuzyi Kembali ke Panggung Politik, Semoga Dapat Sampaikan Pesan Antikorupsi

JAKARTA (IM) - Eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah bebas dari penjara, tampaknya bakal terjun lagi ke politik. KPK berharap, Romahurmuzyi dapat memberikan pesan antikorupsi saat kembali lagi ke panggung politik. Seperti diketahui bahwa Romy adalah terpidana kasus suap terkait jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) pada tahun 2019.

"Kami berharap, mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan kepada lingkungannya bahwa efek jera dari penegakkan hukum tindak pidana korupsi itu nyata," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Minggu (6/2).

"Yang tidak hanya berimbas pada diri pelaku, tapi juga terhadap keluarga, kerabat, dan lingkungannya," kata Ali.

Ali menegaskan, peristiwa kasus korupsi sepatutnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Apalagi, pelaku korupsi terbanyak yang ditangani KPK adalah produk dari proses politik. Baik yang berkiprah pada ranah eksekutif maupun legislatif.

Sehingga, kata Ali, lingkungan politik juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menjauhi praktik-praktik korupsi.

"Harapan ini, selaras dengan strategi pencegahan dan pendidikan antikorupsi KPK, yang mendorong perbaik-

kan sistem tata kelola partai politik sekaligus penanaman integritas kepada setiap kadernya," papar Ali.

"Sehingga, masyarakat yang berkiprah dalam sektor politik ini, bisa memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan bangsa dan Negara, dengan tanpa melakukan korupsi," tuturnya.

Ali mengatakan, KPK tidak mempermasalahkan kembalinya mantan ketua umum PPP itu ke panggung politik. KPK tetap menghormati hak-hak setiap mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya. "KPK menghormati hak setiap mantan narapidana korupsi sebagai WNI dalam berserikat, berkumpul, dan beraktivitas dalam lingkungannya masing-masing, termasuk kegiatan politik," jelas Ali.

"Tentu aktivitas tersebut setelah para pihak menyelesaikan masa hukumannya, di mana salah satunya adalah pencabutan hak-hak politik," ucapnya.

Sebelumnya, Romahurmuzyi terlihat di acara Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Yogyakarta dan Hari Lahir (Harlah) PPP ke-49 di Gedung Jogja Expo Center (JEC), Kabupaten Bantul, DIY, Senin (31/1) lalu. Romahurmuzyi bahkan menjadi penyambut sekaligus mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang datang sebagai undangan. **mei**

Kemenkumham Selidiki Pungli untuk Alas Tempat Tidur di Lapas Cipinang

JAKARTA (IM) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelidiki informasi dugaan pungli (pungli) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Dugaan pungli tersebut berkaitan dengan jual beli alas atau tempat untuk tidur narapidana di dalam sel Lapas Cipinang.

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, pihaknya sudah mengonfirmasi informasi tersebut ke Kepala Lapas (Kapalas) Cipinang. Dari klaim Kapalas Cipinang, kata Rika, informasi dugaan pungli jual beli alas tidur untuk narapidana tidak benar alias hoaks.

"Sudah dikonfirmasi ke kapalas Cipinang dan penjelasan dari kapalas mengatakan bahwa apa yang di beritakan tersebut tidak benar," kata Rika saat dikonfirmasi, Minggu (6/2).

Sejauh ini, kata dia, Ditjenpas Kemenkumham belum menemukan kebenaran atau

fakta-fakta soal dugaan pungli jual beli alas tidur di lapas Cipinang. Tapi, kata Rika, Kemenkumham akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun jika terbukti adanya dugaan pungli tersebut.

Sebelumnya, ramai isu soal adanya dugaan praktik pungli jual beli alas atau tempat untuk tidur para narapidana di Lapas Cipinang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, para narapidana tersebut diminta Rp30 ribu per minggu untuk dapat alas tidur di lapas Cipinang.

Dugaan jual beli tempat untuk tidur tersebut terjadi karena Lapas Cipinang dikabarkan kelebihan muatan (over kapasitas). Dugaan praktik jual beli alas tidur di Lapas Cipinang juga dikabarkan sudah terjadi sejak lama.

Sementara menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), praktik pungutan liar pada penyelenggaraan rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) telah jadi persoalan yang sistemik.

Korupsi sistemik ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk praktik jual beli

fasilitas yang marak terjadi di berbagai rutan dan lapas di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, praktik pungli di lingkungan Lapas dilaporkan oleh sejumlah lembaga seperti Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAP, Ombudsman RI, dan LPSK pada 2018 dan 2019.

Sejumlah laporan dari lembaga-lembaga tersebut menjabarkan soal praktik jual beli segala fasilitas dasar yang seharusnya diberikan kepada para tahanan, selain juga praktik mempekerjakan tahanan untuk kepentingan petugas lapas dan rutan.

Berdasarkan beberapa penelitian dan laporan itu, Erasmus pun mengamini adanya praktik ini yang terus berlangsung selama menahun. Hal ini diduga ditengarai dengan kondisi buruk dalam lapas dan rutan di Indonesia. "Kondisi penuh sesak rutan dan lapas membuat hak dasar misalnya tempat tidur yang layak pun menjadi dapat diperdagangkan," sebutnya. **han**



FOTO: ANT

POTENSI PENYEBARAN COVID-19 DI RUANG PUBLIK

Sejumlah warga tidak mengenakan masker saat berkunjung ke Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (6/2). Penerapan protokol kesehatan yang tidak baik saat berada di ruang publik dinilai berpotensi meningkatkan penyebaran COVID-19 terutama di masa pandemi gelombang ketiga yang disebabkan varian omicron.

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND ("SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND")

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND yang telah diumumkan melalui surat kabar "International Media" tertanggal 20 Desember 2021, kami, PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND sehubungan dengan ketentuan penerapan ketentuan Kelas Unit Penyertaan dan penyesuaian ketentuan terhadap peraturan perundangan-undangan, sebagaimana termaktub dalam akta addendum SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND.

Adapun rincian perubahan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA

Jakarta, 7 Februari 2022

Manajer Investasi
SYAILENDRA BALANCED OPPORTUNITY FUND
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan